

PELUANG KERJA NON-FARM DI PERDESAAN
(KAJIAN TEORETIS STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERDESAAN)

Apik Budi Santoso
Jurusan Geografi FIS - UNNES

Abstrak

Pendekatan pengembangan peluang kerja non-farm sekurang-kurangnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, pendekatan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan diri dan merangsang munculnya motivasi-motivasi baru dalam diri pekerja. Kedua, pendekatan ini secara tidak langsung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional melalui proses *consumption linkages*, *backward linkages*, dan *forward linkages*. Seiring dengan penerapan strategi diversifikasi usaha tani dan peningkatan peluang kerja non-farm, perlu diperhatikan juga karakteristik masyarakat perdesaan yang masih tradisional untuk dapat diubah menjadi pemikiran-pemikiran yang maju, sehingga masyarakat perdesaan mulai terbuka terhadap inovasi, informasi yang positif, dan teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan meningkatkan taraf ekonominya.

Kata Kunci: Non-farm, pengentasan kemiskinan, perdesaan

PENDAHULUAN

Dalam tahun-tahun terakhir ini, sektor non-farm di perdesaan telah mendapat perhatian yang cukup, baik dari pembuat kebijakan maupun dari para analis. Perhatian ini bersumber dari dua analisis utama, yang pertama adalah analisis keterkaitan antara sektor farm dengan sektor non-farm dalam perekonomian suatu negara atau suatu wilayah, yang kedua adalah analisis tentang pembangunan perdesaan secara menyeluruh dalam aktivitas-aktivitas non-farm (Islam, 1997).

Konseptualisasi yang paling relevan untuk membahas pembangunan masyarakat perdesaan adalah *Community Development*. Konsep ini dikembangkan terutama oleh ilmuwan sosial Amerika Serikat sesudah Perang Dunia II (Mas'ud, 1994:23). Tugas mereka waktu itu adalah menemukan mekanisme rekayasa sosial yang bisa dipakai oleh masyarakat negara-negara

baru merdeka untuk memodernisasikan diri dan menjadi bagian dari masyarakat dunia non komunis.

Dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia, perluasan kerja telah lama diletakkan sebagai dasar perencanaan pengembangan perdesaan (*rural development planning*) (Effendi, 1994:28). Beberapa strategi, baik langsung seperti program padat karya, maupun tidak langsung seperti pusat-pusat industri, program intensifikasi pertanian, telah diterapkan. Namun ada petunjuk bahwa peluang kerja, khususnya peluang kerja bukan pertanian (non-farm), yang diharapkan mampu menampung kelebihan sumberdaya manusia (tenaga kerja) perdesaan, belum berkembang seperti yang diharapkan. Non-farm adalah kegiatan ekonomi seperti industri rumah tangga, industri pengolahan pertanian, bengkel reparasi, usaha angkutan, perdagangan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk

tujuan komersial di luar kegiatan pertanian yang dilakukan di kawasan perdesaan. Pelaku kegiatan ini adalah rumah tangga petani dan non petani (Effendi,1995:201).

Masalah terbatasnya lapangan kerja di perdesaan semakin mengkhawatirkan,karena dana pemerintah yang selama periode “kejayaan” minyak sebagian dapat disalurkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat menciptakan peluang kerja, mulai terbatas. Turunnya harga minyak dan ekspor non migas sampai dasawarsa 1990-an turut memperburuk kondisi ini.

Sementara itu daya serap sektor informal perkotaan selama ini mampu menyerap sebagian tenaga kerja perdesaan cenderung menurun (Effendi,1994:28). Peraturan-peraturan yang mengatur kkegiatan sektor informal, seperti daerah bebas becak, penertiban pedagang kakilima, dan penertiban pedagang asongan tanpa diasadari telah mempersempit kemungkinan tenaga kerja untuk mengadu nasib di sektor itu.

Masalah peluang kerja di perdesaan tampaknya akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang, karena nagkatan kerja yang menyelesaikan pendidikan terus bertambah sebagai akibat meluasnya kesadaran untuk bersekolah dan tersedianya sarana pendidikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di perdesaan Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kota, untuk desa 61 % dan kota 52,5 % (BPS,1997:19). Mengingat terbatasnya lahan yang dapat digarap khususnya di Jawa, dan sektor pertanian tanaman pangan cenderung berkurang kemampuan dalam menyerap tambahan pekerja, maka cukup beralasan jika disarankan bahwa perlu dipikirkan strategi pengembangan sumberdaya perdesaan yang dapat menciptakan peluang kerja perdesaan.

Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumberdaya manusia. Kemiskinan muncul karena sumberdaya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tida mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu oleh kemiskinan.

Tidak mudah untuk membangun pengertian kemiskinan karena menyangkut berabagai macam dimensi. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, politik (Ellis,1984:242-245). Berdasarkan dimensi ini dapat dianalisis sifat-sifat kemiskinan. Dengan demikian dapat dibedakan aspek-aspek kemiskinan dan menguak sebab-sebab kemiskinan. Atas dasar itu kemudian dapat dirancang upaya untuk mengurangi kemiskinan.

PEMBAHASAN

Konsep-Konsep dan Permasalahan

Kajian pembangunan masyarakat perdesaan dapat disoroti dari aspek geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis dan politis. Tinjauan geografis mengenai wilayah perdesaan dimulai sejak tahun 1970-an. Sejak itu berkembang Geografi Perdesaan (*Rural Geography*) yang merupaka suatu studi dalam ilmu geografi yang mempelajari fenomena sosial dan ekonomi beserta perubah-perubahannya di wilayah perdesaan (Suhardjo,1999:3). Perdesaan (*rural*) dapat diartikan sebagai bentuk daerah otonom yang terendah sesudah kota (Sugihen,1997:25). Dalam pemakaian sehari-hari istilah desa sering disamakan dengan perdesaan yaitu kawasan yang memiliki karakteristik desa. Karakteristik yang menonjol pada perdesaan yang masih asli

(tradisional) diantaranya mengenai pola-pola interaksi sosial yang sangat erat, perilaku individu dan masyarakat yang masih tergantung kepada alam sehingga kebudayaan yang mereka ciptakan masih sederhana serta aktivitas ekonominya didominasi oleh sifat agraris yang subsisten.

Dalam perkembangannya, perdesaan akan mengalami perubahan-perubahan sosial (*social changes*) dalam berbagai aspek kehidupan yang disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal maupun faktor internal. Pengaruh kebudayaan dari luar yang masuk kedalam masyarakat perdesaan akan menyebabkan terjadinya *difusi* kebudayaan yang dapat mengubah sifat-sifat masyarakat yang tradisional menjadi modern (Soekanto, 1987:281-283). Di Indonesia perkembangan perdesaan terpola dalam tahapan-tahapan perkembangan yang disebut tipologi desa dimulai dari desa yang masih sangat tradisional yaitu pradesa, swadaya, swakarya, dan desa swasembada yang sudah maju (Sugihen, 1997:25-28).

Diversifikasi pertanian dapat diartikan sebagai usaha para petani untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara melakukan penganeekaragaman usaha tani, misalnya pertanian campuran (*mixed farming*) tumpangsari, minapadi dan lainnya tanpa meninggalkan tanaman pokok (Effendi, 1995:221). Dalam rangka peningkatan produksi pertanian melalui diversifikasi ini, akan memunculkan usaha-usaha non-farm yang dilakukan oleh rumah tangga petani di kawasan perdesaan. Dalam hal ini seorang ilmuwan Jepang Oshima menyatakan:

“diversified agricultural gives rise to non-farm job for farm family members because diversified generally requires more agro-industry processing (handling, grading, cook-

ing, canning, picking, transporting, and marketing services than does rice)”
(Oshima:1987:61).

Dalam sistem usaha tani, lahan pertanian merupakan faktor produksi dan komoditi yang penting dalam proses atau kegiatan usaha tani, terutama dalam upaya menyediakan kebutuhan bahan makanan untuk keluarga sendiri dan menyisihkan sebagian atau semua yang tersisa untuk dijual bagi kepentingan orang lain (Sugihen, 1997:123). Tetapi permasalahan yang dijumpai sekarang, bahkan sejak lama telah terjadi pengurangan secara terus-menerus pemilikan lahan pertanian. Hal ini terkait dengan faktor pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi termasuk penduduk perdesaan di Indonesia. Menurut Clifford Geertz (1983) telah terjadi *involusi* pertanian secara terus-menerus sejak masa penjajahan dan mestinya sampai masa sekarang khususnya di Jawa dan Bali. Perubahan menurun bukan hanya dalam hal pemilikan lahan, tetapi juga luas lahan yang diusahakan sebagai faktor produksi pertanian, sehingga produktivitas pertanian menurun hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal keluarga petani.

Masalah lain yang muncul selain terbatasnya lahan sebagai faktor produksi pertanian, adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia petani dalam penguasaan teknologi pertanian, tradisi yang mereka lakukan dalam mengolah lahan mereka peroleh dari nenek moyang secara turun-temurun, kurang terbuka terhadap inovasi informasi dan teknologi dan enggan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi (Sugihen, 1997:153). Sebagai muara dari permasalahan-permasalahan ini adalah terbatasnya lapangan pekerjaan bagi petani, dan mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menyandang status pengangguran, pendapatan rendah dan miskin. Sampai saat ini isue

kemiskinan di perdesaan tetap menjadi isue utama dalam pembangunan di Indonesia (Suhardjo,1994:72).

Biro Pusat Statistik (BPS,1997) mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih dari pada pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari perorang, perumahan,pakaian,kesehatan, pendidikan. Jumlah uang tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Selama tahun 1990 – 1996 penduduk miskin telah berkurang lebih dari 4,5 juta orang, yaitu dari 27,1 juta pada tahun 1990 menjadi 22,4 juta pada tahun 1996. Berbagai upaya pemerintah Indonesia telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik yang dilakukan melalui program sektoral melalui intervensi khusus yang telah terbukti dapat menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maupun melalui program lintas sektoral.

Namun sejak tahun 1998 terjadi “bencana nasional” krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis politik dan moral, yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin) dalam siaran pers tanggal 10 Oktober 1999 menyebutkan bahwa akibat krisis multidimensional yang melanda Indonesia menyebabkan kemiskinan meningkat tajam, tahun 1970 sekitar 60 juta, tahun 1997 menurun menjadi sekitar 20 juta, dan tahun 1999 meningkat melebihi angka tahun 1970 sebesar 65 juta.

Dari angka tersebut kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Pengembangan Perdesaan dan Peluang Kerja

Bersumber pada teori dualisme yang dikembangkan oleh Booke, yang kemudian dipakai oleh Geertz (1983) untuk menjelaskan situasi kemiskinan dan peluang kerja perdesaan Jawa yang melahirkan konsep involusi pertanian, dirancanglah konsep dasar pembangunan di negara-negara berkembang. Pengembangan konsep itu juga dipengaruhi keberhasilan Rencana Marshall yang diterapkan di Eropa dan Amerika serta pemikiran-pemikiran Myrdal dan Hirschman meyakini bahwa industrialisasi adalah salah satu strategi yang ampuh untuk mengikis keterbelakangan negara-negara sedang berkembang.

Oleh karena itu, sampai akhir 1960-an di kebanyakan negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, strategi pembangunan yang diterapkan untuk merangsang pengembangan perdesaan (termasuk peluang kerja) mengandalkan pada pendekatan *growth centres* (pusat-pusat pertumbuhan) dan meletakkan industri sebagai sektor unggulan (*leading sector*). Dengan memusatkan industri di pusat pertumbuhan, maka diharapkan strategi itu mampu memecahkan masalah keterbelakangan, peluang kerja, dan kemiskinan di perdesaan. Secara teoretis diyakini bahwa daerah pinggiran (**periphery**) akan berkembang melalui efek menyebar (*spread effect*) atau efek tetesan kebawah (*trickling down effect*) dari pusat-pusat pertumbuhan. Pada awalnya pendekatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, bahkan kaum radikal memendang pendekatan ini sebagai strategi tepat guna untuk memerangi kemiskinan di

perdesaan negara-negara sedang berkembang (Todaro,1983).

Meskipun pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang mengalami pertumbuhan yang menakjubkan, tetapi akhir tahun 1970-an banyak para pakar meragukan dan mengecam pendekatan itu. Alasannya, hasil studi-studi empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa strategi itu tidak hanya gagal dalam menyebarkan dan merembeskan efek dari pusat-pusat pertumbuhan dan memecahkan masalah keterbelakangan dan kemiskinan di daerah pinggiran, tetapi justru kesenjangan sosial ekonomi antara pusat dan pinggiran semakin melebar.

Tekanan-tekanan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan di perdesaan belum mengalami perubahan, bahkan ada petunjuk bahwa kemiskinan semakin meluas. Kondisi ini telah mendorong sebagian tenaga kerja dari pinggiran bermigrasi permanen atau sirkuler ke pusat untuk mencari pekerjaan. Karena industri yang dikembangkan di pusat adalah industri yang menggunakan teknologi tinggi dan hemat tenaga kerja, maka kebanyakan tenaga kerja yang berasal dari pinggiran terpaksa masuk ke sektor informal dan hanya sebagian kecil terutama yang berpendidikan yang dapat masuk ke sektor formal. Singkat kata, pendekatan itu tidak hanya gagal dalam memecahkan masalah kemiskinan di perdesaan, tetapi justru memunculkan masalah baru di pusat-pusat pertumbuhan. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakberhasilan pendekatan itu, pertama industri dipandang sebagai jalan pintas untuk memecahkan seluruh masalah-masalah sosial ekonomi, dan cenderung mengabaikan sektor pertanian atau cenderung menguntungkan pusat, dalam hal ini kota (*urban bias*), *kedua* penerapan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*) digunakan sebagai

landasan operasi dan dalam banyak hal mengesampingkan potensi, aspirasi, dan kemampuan penduduk pinggiran.

Penganut pandangan radikal bahkan melontarkan tuduhan bahwa strategi itu telah menyebabkan negara-negara berkembang semakin tergantung pada negara-negara maju. Ketergantungan itu tanpa disadari telah menjerumuskan sebagian besar penduduk miskin negara-negara sedang berkembang kedalam kemiskinan yang akut. Alasannya, negara-negara maju yang memiliki modal dan teknologi lebih mendapatkan keuntungan dengan strategi itu, karena negara-negara sedang berkembang terpaksa meminjam modal dan membeli teknologi dari mereka. Dengan kata lain, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pengembangan industri mengalir ke pemilik modal dan teknologi negara maju ketimbang merembes ke golongan miskin di negara-negara sedang berkembang (Roxborough,1986:43-44).

Menyadari kelemahan itu, maka muncul pemikiran baru yang menekankan bahwa pengembangan perdesaan sebaiknya bersumber pada potensi sumberdaya alam dan manusia daerah itu, memprioritaskan kepentingan golongan miskin dan membangun dari bawah. Oshima (1987) menyarankan bahwa dalam mengembangkan perdesaan keterkaitan sektor pertanian dengan non pertanian perlu mendapat prioritas. Pendekatan ini menekankan bahwa strategi dasar dalam pembangunan ekonomi perdesaan mengembangkan sektor pertanian yang bersifat komersial (orientasi pasar) dan mempunyai kaitan dengan sektor lain. Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, tetapi mampu merangsang pertumbuhan kegiatan non-farm. Artinya, ia dapat menaikkan penghasilan petani dan menciptakan peluang kerja bukan pertanian yang amat

diperlukan untuk menampung tenaga kerja berasal dari rumah tangga petani miskin dan *tunakisma* (tidak memiliki lahan).

Menurut Mellor (1976), peningkatan penghasilan masyarakat prdesaan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu *intensifikasi* dan *diversifikasi* pertanian. Mellor meyakini bahwa kedua strategi itu dapat meningkatkan produksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan petani kaya. Kemudian ini akan diikuti dengan perubahan pola konsumsi rumah tangga petani kaya yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan industri, perdagangan, dan pelayanan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini secara langsung akan membuka peluang pekerjaan non-farm perdesaan. Peluang ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dari rumah tangga miskin perdesaan. Akhirnya, penghasilan rumah tangga miskin akan meningkat dan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan hasil pertanian dan bukan pertanian. Sektor pertanian melalui intensifikasi usaha tani dalam teori ini diletakkan sebagai faktor yang merangsang pertumbuhan pekerjaan non-farm perdesaan melalui peningkatan penghasilan dan perubahan pola konsumsi rumah tangga perdesaan.

Namun, Papola (1987) menegaskan bahwa intensifikasi pertanian belum tentu mampu merangsang pertumbuhan industri perdesaan. Peningkatan produksi dan penghasilan petani tidak mempunyai efek positif pada pertumbuhan industri perdesaan. Dia mengemukakan bahwa intensifikasi pertanian yang memusatkan pada satu tanaman tertentu (biasanya tanaman pangan seperti padi) tidak mempunyai daya untuk merangsang pertumbuhan industri. Singkatnya, Intensifikasi pertanian dapat melepaskan rumah tangga petani dari sistem subsisten ke sistem komersial dan meningkatkan penghasilan petani setingkat di atas kebutuhan subsisten,

tetapi kurang mampu membuka peluang kerja non-farm di perdesaan. Kasus di Indonesia dijelaskan oleh Manning (1988) bahwa intensifikasi pertanian lewat program *revolusi hijau* telah mampu meningkatkan penghasilan petani, namun dampaknya terhadap peluang kerja non-farm perdesaan masih sangat terbatas. Keengganan petani kaya untuk menanam kembali penghasilan dari sektor pertanian ke sektor produktif di perdesaan diduga sebagai hal yang menghambat. Ada kecenderungan kelebihan penghasilan yang didapat dari hasil intensifikasi pertanian (kenaikan penghasilan dari produksi padi) dibelanjakan untuk keperluan yang tidak produktif dalam usaha memperoleh prertise siosial.

Disamping itu agaknya kurang realistis bila hendak mentransformasikan secara cepat suatu sistem pertanian tradisional (subsisten) yang sudah mendarahdaging dalam suatu masyarakat ke suatu sistem pertanian komersial melalui intensifikasi pertanian. Hambatan-hambatan kultural acapkali menghadang usaha itu.

Diversifikasi Pertanian dan Non-Farm: Strategi Alternatif

Pembahasan di atas memberikan petunjuk bahwa intensifikasi pertanian kurang mempunyai daya untuk merangsang pertumbuhan peluang kerja non-farm. Mengingat lahan pertanian yang semakin terbatas kalau hendak melaksanakan ekstensifikasi, maka penganekaragaman pertanian (usaha tani) campuran tanpa meninggalkan tanaman pokok (diversifikasi pertanian) adalah langkah yang perlu dipertimbangkan.

Effendi (1991) berusaha menguji hipotesis Oshima tentang keterkaitan antara diversifikasi usha tani dan pertumbuhan non-farm di Kecamatan Jatinom Klaten. Studi itu menerapkan pendekatan analisis keterkaitan pertumbuhan (*growth linkages analysis*) yang diajukan

oleh seorang pakar geografi dari Inggris, Harriss (1987:275). Pendekatan ini mengkaji keterkaitan (*linkages*) antara pengembangan pertanian dengan kegiatan non-farm dengan memusatkan pada tiga keterkaitan, yaitu: (1). Keterkaitan konsumsi (*consumption linkages*), yang bersumber dari kenaikan pendapatan usaha tani. (2). Keterkaitan ke depan (*forward linkages*), dari diversifikasi usaha tani dengan industri pengolahan, perdagangan dan pelayanan. (3). Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*), dari diversifikasi pertanian dengan kegiatan yang mendukung masukan usaha tani.

Effendi (1991) menemukan bahwa diversifikasi pertanian mampu merangsang pertumbuhan peluang kerja non-farm. Strategi ini dapat merangsang perkembangan peluang kerja non-farm melalui jalinan konsumsi (*consumption linkages*). Artinya efek peningkatan penghasilan dari diversifikasi pertanian lebih mampu merangsang perkembangan non-farm dari pada efek dari produksi. Lemahnya jalinan produksi ke depan (*forward linkages*) antara lain disebabkan antara lain rendahnya tingkat mekanisme usaha tani dan kebanyakan masukan-masukan untuk usaha tani diproduksi di daerah lain. Beberapa kegiatan non-farm yang berkaitan dengan backward linkages antara lain reparasi alat-alat pertanian, inseminator sapi, rentenir (*bank plecit*), pelayanan transportasi. Dibandingkan dengan backward linkages, forward linkages lebih lemah interaksinya dengan diversifikasi pertanian. Oleh karena itu, ditingkat lokal peluang kerja non-farm yang berkembang bersamaan dengan diversifikasi usaha tani adalah yang mempunyai jalinan dengan konsumsi seperti perdagangan dan jasa pelayanan. Namun demikian pada skala makro hal itu dapat merangsang

pertumbuhan industri yang tidak hanya berkaitan dengan konsumsi tetapi juga produksi.

Tidaklah berlebihan kalau disarankan bahwa strategi yang perlu dipikirkan dalam mengembangkan kegiatan non-farm adalah usaha yang memungkinkan petani dapat melakukan diversifikasi pertanian. Selain diversifikasi pertanian meningkatkan peluang kerja, juga mempunyai keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan tanaman tunggal, misalnya hanya padi.

Nurul Islam (1997) memberikan empat argumen yang mendukung dikembangkannya sektor non-farm di pedesaan, (1) non-farm memberikan lapangan kerja, (2) memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan, (3) memperlambat proses urbanisasi, dan (4) membantu menyebarkan pemerataan pendapatan yang dapat menurunkan kemiskinan.

Alternatif Strategi Pengentasan Kemiskinan

Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa budaya pedesaan dan faktor dampak krisis ekonomi menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan, faktor peluang kerja produktif lebih mungkin menciptakan kondisi kemiskinan. Tantangan yang dihadapi adalah strategi apa yang perlu dilakukan untuk melepaskan kaum miskin dari belenggu kemiskinan mereka. Pertama-tama, asumsi dasar dalam merumuskan kebijakan memerangi kemiskinan perlu ditinjau kembali. Kebijakan yang diterapkan sebaiknya mengacu kepada kebijakan menciptakan peluang kerja yang lebih produktif, tekanan pada produktif dari pada pekerjaan. Agaknya asumsi dasar yang mengacu pada konsep pekerjaan non-farm adalah salah satu alternatif yang perlu dipikirkan. Konsep ini memusatkan perhatian pada usaha yang lebih menekankan pada kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Lembaga swadaya masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengembangan usaha kegiatan non-farm, agar ada pembinaan terhadap masyarakat perdesaan yang diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang produktif. Dengan pendekatan ini diharapkan pendapatan masyarakat perdesaan meningkat yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan.

Setidaknya ada tiga cara dalam sektor non-farm perdesaan dapat memperbaiki distribusi pendapatan (Islam, 1997:4-8). Pertama, ia menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi para petani marjinal dan buruh tanpa lahan yang tidak dapat memperoleh pendapatan dan penghidupan yang cukup dari pertanian. Kurangnya fleksibilitas pada upah pertanian menghalangi para pekerja pertanian untuk menemukan lapangan kerja dengan upah pasar, sehingga mereka terpaksa menganggur. Kebutuhan-kebutuhan pangan, pertimbangan-pertimbangan efisiensi, ketiadaan informasi yang baik tentang upah pasar, dan tekanan serikat buruh dapat mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Pada masa paceklik para petani perdesaan berupaya mencari pekerjaan non-farm walaupun mungkin upah yang diterimanya lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan pertanian. Jenis pekerjaan ini biasanya berupa pekerjaan kasar tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti buruh pekerjaan pembangunan jalan, bangunan gredung, pengolahan lahan, dan lainnya.

Meskipun sektor non-farm cukup besar memberikan kontribusi pendapatan bagi kaum miskin, tetapi tidak selalu dapat memperbaiki distribusi pendapatan yang baik. Petani kaya akan mendapatkan income yang lebih besar sebagai pengusaha atau wirausaha, sedangkan petani kecil tetap sebagai buruh, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, perawatan

anak, dan lainnya. Kedua, sektor non-farm perdesaan memungkinkan kaum miskin dapat menghapuskan fluktuasi pendapatan pertanian dari satu musim ke musim yang lain dengan diversifikasi sumber-sumber pendapatan. Ketiga, sejauh industri perdesaan memproduksi barang-barang dengan harga murah dibandingkan dengan barang-barang hasil industri kota, ia dapat mempertahankan pendapatan yang riil dari kaum miskin yang mempunyai daya beli rendah.

Pendekatan pengembangan peluang kerja non-farm sekurang-kurangnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, pendekatan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan diri dan merangsang munculnya motivasi-motivasi baru dalam diri pekerja. Kedua, pendekatan ini secara tidak langsung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional melalui proses *consumption linkages*, *backward linkages*, dan *forward linkages*.

PENUTUP

Dalam upaya pengembangan sumberdaya alam dan manusia di perdesaan nampaknya diversifikasi usaha tani adalah salah satu strategi yang perlu dipikirkan. Strategi ini dapat membuka peluang kerja non-farm di perdesaan yang sangat diperlukan bagi pengembangan sumberdaya manusia.

Seiring dengan penerapan strategi diversifikasi usaha tani dan peningkatan peluang kerja non-farm, perlu diperhatikan juga karakteristik masyarakat perdesaan yang masih tradisional untuk dapat diubah menjadi pemikiran-pemikiran yang maju, sehingga masyarakat perdesaan mulai terbuka terhadap inovasi, informasi yang positif, dan teknologi baru yang dapat

meningkatkan kualitas dirinya dan meningkatkan taraf ekonominya.

Strategi peluang kerja non-farm perlu dipertimbangkan oleh penentu kebijakan dalam usaha meningkatkan peluang kerja produktif di perdesaan yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, 1997, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, BPS.
- Dickenson, S.P. et. al, 1983, *A Geography of The Third World*, London, Methuen.
- Effendi, T.N., 1991, *Agricultural Diversification and Rural Non-Farm Activities in Central Java: A Case Study of Jatinom, Klaten*, Disertasi PhD., Flinders University, Australia.
- _____, 1994, *Diversifikasi Pertanian*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- _____, 1995, *Sumberdaya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- Ellis, G.F.R., 1984, *The Dimension of Poverty*, Social Indicator Research.
- Geertz, Clifford, 1983, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara.
- Harriss, Barbara, 1987, *Regional Growth Linkages From Agriculture*, Journal Development Studies, 23 (2), January, London.
- Islam, Nurul, 1997, *The Non-Farm Sector and Rural Development*, Review of Issues and Evidence, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
- Manning, Christ, 1988, *Rural Employment Creation in Java: Lesson From The Green Revolution and Oil Bomb*, Population and Development Review, 14 (1), Yogyakarta.
- Mellor, John, W., 1976, *The New Economics of Growth: A Strategy of India and Developing World*, Ithaca, Cornell University Press.
- Mas' oed, Mohtar, 1994, *Rekonseptualisasi Pembangunan Masyarakat Desa: Pokok-Pokok Pikiran*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Oshima, Harry, 1987, *Economic Growth in Monsoon Asia: A Comparative Survey*, Tokyo, University of Tokyo Press.
- Papola, T.S., 1987, *Rural Industrialization and Agricultural Growth: A Case Study of India* Reizwanul Islam (eds), Rural Industrialization and Employment in Asia, New Delhi, ILO-ARTEP.
- Roxborough, Ian, 1986, *Teori-Teori Keterbelakangan*, Jakarta, LP3ES.
- Suhardjo, A.J., 1994, *Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Sebagai Indikator Relevansi dan Efektivitas Program Pembangunan Masyarakat Perdesaan*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- _____, 1999, *Diversifikasi Ekonomi Perdesaan: Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.

Sugihen, Bahreint, 1997, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press.

Todaro, Michael P., 1983, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta, Ghalia Indonesia.